



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

....., Tempat dan Tanggal Lahir Reteh, 12 Desember 1960, Agama Islam, Pekerjaan Ustadz, Pendidikan SLTA, Tempat Kediaman di Dusun Harapan Jaya RT. 001 RW. 001, Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

....., Tempat dan Tanggal Lahir, Teluk Pinang, 01 Januari 1972, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat Kediaman di Dusun Harapan Jaya RT. 001 RW. 001, Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Pemohon II**. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yunus Saptayani, S.H.** advokat/penasehat hukum pada Kantor "**YUNUS SAPTAYANI, S.H & PATNERS**" beralamat di Jalan M. Siap / Lr. Kapur RT. 003 RW. 004 NO. 64 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 247/SK-P/DN/2023/PA.Tbh tanggal 12 Juni 2023. Selanjutnya Para

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Pemohon I dan Para Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 12 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon I bernama dan Para Pemohon II bernama adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan Pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Selasa Tanggal 5 Agustus 1985, bertepatan dengan 18 Dzulqa'idah 1405 H, dengan Pak Imam / Petugas P3N Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pernikahan Para Pemohon I dengan Para Pemohon II tidak di catatkan Oleh Petugas P3N tersebut;
2. Bahwa sebelum menikah Para Pemohon I bernama berstatus Jejak dan Para Pemohon II bernama berstatus Gadis;
3. Bahwa selama menjalani Pernikahan, hubungan Para Pemohon I dengan Para Pemohon II berjalan rukun dan harmonis, sampai dengan sekarang ini;
4. Bahwa selama menjalani Pernikahan Para Pemohon I dengan Para Pemohon II dikaruniai 5 orang anak dengan identitas yang bernama sebagai berikut:
 1., Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Simpang Gaung, 26-06-1988;

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2., Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Simpang Gaung, 09-03-1991;
3., Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Batang Sari, 04-08-1995;
4., Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Pekanbaru, 29-01-1999;
5. Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Batang Sari, 20-01-2006;
5. Bahwa para Para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Para Pemohon yang bernama, Nik. 1404076001060001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Batang Sari, 20-01-2006 (umur 17 tahun 5 bulan) , Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan belum bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, nomor handphone 082172549346, Email;adriasariaspa@gmail.com, Alamat di Dusun Harapan Jaya RT. 001 RW. 001, Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan akan dinikahkan dengan seorang Laki-laki (calon Suami anak para Para Pemohon) yang bernama**bin** Nik. 1404141306030004, Tempat dan Tanggal Lahir, Kuala Lemang, 23-01-2002 (umur 21 tahun 5 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir Tamat SLTA, Pekerjaan Karyawan PT. Batu Bara di Batu Ampar, Kewarganegaraan Indonesia, batu Ampar RT. 006 RW. 002, Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
6. Bahwa para Para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Para Pemohon yang bernama dengan calon Suami anak para Para Pemohon yang bernama**bin**, namun ditolak dengan alasan anak para Para Pemohon tersebut belum cukup umur (17 tahun 5 bulan), berdasarkan surat Penolakan Pernikahan dari Kantor

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Gaung, kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Nomor: B- 274/Kua.04.02.12/PW.01/VI/2023. Tertanggal 06 Juni 2023;

7. Bahwa anak para Para Pemohon bernama dengan calon Suami anak para Para Pemohon bernamatelah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak 1(satu) tahun lalu atau sejak Tahun 2022 dan pada tanggal 25 Mei 2023 telah dilaksanakan acara lamaran dan lamaran diterima dan uang hantaran sebesar Rp. 30.000.0000 (tiga puluh juta rupiah) juga telah diserahkan kepada pihak keluarga calon suami anak para Para Pemohon dan para Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak para Para Pemohon berencana akan melaksanakan rsespsi pesta pernikahan pada Tanggal 12 Juli 223/ setelah Hari Raya Idul Adha;
8. Bahwa hubungan anak para Para Pemohon dengan calon Isterinya tersebut sudah begitu dekat dan sudah sering berkunjung bahkan sering berduaan dan oleh karena itu para Para Pemohon sangat khawatir jika anak para Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Para Pemohon tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudhorat, fitnah, gunjingan serta berbuat hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, dan oleh sebab itu juga para Para Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan Pernikahan anak Para Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut secepatnya;
9. Bahwa anak para Para Pemohon bernama dengan calon Suami anak para Para Pemohon bernamatidak ada halangan untuk menikah secara syar'i;
10. Bahwa para Para Pemohon melihat anak para Para Pemohon bernama sudah terlihat dewasa dan para Para Pemohon juga melihat calon Suami anak para Para Pemohon bernamasudah Dewasa dan bisa menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab dan sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Batu Bara dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena hubungan anak para Para Pemohon dengan calon Suami anak para Para Pemohon sudah terlalu dekat, maka dari itu para Para Pemohon ingin anak para Para Pemohon tersebut segera menikah, namun Pernikahan anak Para Para Pemohon tersebut terhambat karena usia anak para Para Pemohon masih berusia 17 tahun 5 bulan / belum mencapai batas minimum usia kawin anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh sebab itu para Para Pemohon berharap agar yang Mulia Hakim perkara ini dapat mengabulkan Permohonan para Para Pemohon.
13. Bahwa para Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada anak para Para Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama**bin**
3. Membebaskan kepada para Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q yang mulia Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasanya;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya bujang;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon menyetujui keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat dekat dan mereka sering bertemu serta pergi bersama;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga dari pihak calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkannya anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut setelah semua persyaratan terpenuhi;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik;

Bahwa anak Para Pemohon bernama (calon istri)

telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernamaatas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya dan calon suami saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut dengan hantaran sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah persidangan selesai;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu menafkahi dan sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Batu Bara yang memperoleh gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernamatelah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernamadan Ibu Kandung saya bernama
- Bahwa saat ini calon istri saya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bisa menikahkan kami;

- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut dengan hantaran sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami pada setelah persidangan selesai;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Karyawan PT. Batu Bara yang memperoleh gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Ayah Kandung dari calon suami yang bernamatelah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut;

- Bahwa benaradalah anak kandung saya dengan istri saya yang bernama
- Bahwa anak saya yang bernamatersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun;

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak saya sudah melamar calon istri saya tersebut dengan hantaran sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami pada setelah persidangan selesai;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Karyawan PT. Batu Bara yang memperoleh gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa Ibu Kandung dari calon suami yang bernama telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama **bin Sarimin**;
- Bahwa anak saya yang bernama tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh



pihak lain yang memaksa;

- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak saya sudah melamar calon istri saya tersebut dengan hantaran sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami pada setelah persidangan selesai;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Karyawan PT. Batu Bara yang memperoleh gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaNIK 1404071212600003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 07 Desember 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Maryamah** NIK 1404074101720006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 07 Desember 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas namaBerdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-20112017-0195 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 20 November 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas namaNomor DN-09/D-SMP/K13/1989628 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah smp Negeri 3 Gaung tanggal 21 Juli 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 449/Sket-SG/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Gaung, tanggal 18 Juni 2023 Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas namaNo. 1404120809160001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 Maret 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaNIK 1404141306030004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 25 September 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaNIK 1404140708120009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 05 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK 1404145003850004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 10 Oktober 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-11052018-0116 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 17 Agustus 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;
11. Fotokopi Ijazah atas nama Nomor DN-09/M-SMA/K13/0037308 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri Tuah Kemuning tanggal 4 Mei 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/72/2/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 15 Januari 2002. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama No. 1404140708120009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 05 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor: B-274/Kua.04.02.12/PW.01/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 Juni 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.14;

B. Saksi:

1., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Parit 10 RT.010 RW.003 Desa simpang Gaung Kecamatan Simpang Jaya Kabupaten Indragiri Hilir, Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh



suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Para Para Pemohon;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama akan tetapi anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Para Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut dengan hantaran sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami pada setelah persidangan selesai;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT. Batu Bara yang memperoleh gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

2., umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Batu Ampar RT.005

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh



RW.002 Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama akan tetapi anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Para Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut dengan hantaran sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami pada setelah persidangan selesai;

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT. Batu Bara yang memperoleh gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 247/SK-P/DN/2023/PA.Tbh tanggal 12 Juni 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama, tanggal lahir di Batang Sari, 20 Januari 2006 (17 tahun 5 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona stDahlan in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal stDahlanng*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernamadengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernamaditolak oleh pihak Kantor Urusan

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon istri yang dalam hal ini adalah anak Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**”, sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berkenalan selama 2 tahun lebih, dan tunangan beberapa bulan yang lalu, dan melihat hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.14 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Ikrama bin** dan yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.14, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **dan Maryamah**) membuktikan Para

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Aspa Adriasari**) membuktikan **Aspa Adriasari**, perempuan, lahir di Batang Sari, 20 Januari 2006, adalah anak kandung Para Pemohon, yang mana pada saat ini anaknya yang bernama **Syafitri** tersebut masih berumur 17 tahun 5 bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Ijazah atas nama **Syafitri**) membuktikan bahwamenyelesaikan pendidikannya pada tingkat SMP/Sederajat pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah) membuktikan Para Pemohon dengan telah menikah di Desa Simpang Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 5 Agustus 1985;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Amsyar Amran**) membuktikan anak Pemohon yang bernamatersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernamatersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama) dan alat bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama) membuktikan orang tua calon suami anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama) membuktikan, laki-laki, lahir di Kuala Lemang pada tanggal 23 Januari 2002, adalah anak kandung

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....dan

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Ijazah atas nama), membuktikan bahwa menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Akta Nikah) dan P.13 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama Darman, laki-laki, lahir di Kuala Lemang pada tanggal 23 Januari 2002, adalah anak dari dan

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan) membuktikan Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama tersebut dengan calon suaminya yang bernama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon istri yang dalam hal ini adalah anak Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, perempuan, lahir di Batang Sari, 20 Januari 2006 (umur 17 tahun 5 bulan) adalah anak dari**dan** , yang mana anak Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Pemohon (.....) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama**bin**, laki-laki, lahir di Pelangiran pada tanggal 23 Januari 2002 (umur 21 tahun 5 bulan), anak dari**dan**, yang mana calon suami anak Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan beberapa bulan yang lalu calon suami (.....**bin**) telah melamar calon istri (.....) serta calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan setelah persidangan selesai;
4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon (.....) dan calon suami (.....**bin**) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon (.....) dengan calon suaminya (.....**bin**) dengan alasan karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa antara anak Pemohon (.....) dengan calon suaminya (.....**bin**) tidak mempunyai

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah, susuan dan atau semenda;

7. Bahwa antara anak Pemohon (.....) dan calon suami (.....**bin**) sudah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang pergi bersama sampai ke Tembilahan, sementara orang tua calon istri dan orang tua calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;
8. Bahwa anak Pemohon (.....) dan calon suami (.....**bin**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;
9. Bahwa calon suami (.....**bin**) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Karyawan PT. Batu Bara dan memperoleh gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama yang akan menikah denganmasih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang pergi bersama sampai ke Tembilahan;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa orang tua calon istri dan orang tua calon suami (.....**bin**.....) menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk kini menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa calon suami telah melamar anak Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut yaitu denganserta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh



membimbing rumah tangga dengannanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum Saad al-Dzariah dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- 1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surah al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ ۖ إِنَّهُ كَانَ قَابِضَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

- 2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

السَّبَابُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ جُوزْتِ بِلْتِ، فَإِنَّهُ آغَضٌ لِّلْبَصْرِ وَ آخَصَنُ لِّلْفَرْجِ

يَا مَعْتَزِر

وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَتِ إِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ الْجَمَاعَةِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama**bin**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama**bin**
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1444 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H.

ZULFIKAR, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)